

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TEMUAN BERULANG  
PADA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG)**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : RACHMAT BAGUS SETIAWAN**

**NIM : 126232156**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TEMUAN BERULANG**  
**PADA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG)**



**DIAJUKAN OLEH :**  
**NAMA : RACHMAT BAGUS SETIAWAN**  
**NIM : 126232156**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT**  
**UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI**  
**PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2024**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TEMUAN BERULANG  
PADA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG)**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh**



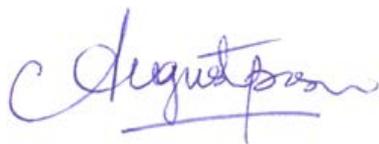
**Rachmat Bagus Setiawan**

---

126232156

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing**



**Augustpaosa Nariman, S.E., M.Ak., Ak.,CA.,CPA**

---

## ABSTRAK

Temuan berulang pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya terkait pengelolaan aset tetap, mencerminkan tantangan dalam implementasi rekomendasi pemeriksaan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang belum optimal. Meskipun upaya perbaikan dilakukan, beberapa kendala masih menyebabkan munculnya masalah serupa dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan atas pengelolaan aset di Kabupaten Kupang. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Sekretariat Daerah, Inspektorat, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek Sistem Pengendalian Internal (SPI), terutama pada komponen lingkungan pengendalian, pemantauan dan komunikasi, serta kurang optimalnya peran pihak internal dan eksternal, menjadi penyebab utama temuan berulang. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan strategi tindak lanjut yang kurang efektif turut mempengaruhi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan SPI, peningkatan koordinasi lintas unit, serta optimalisasi kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat sertifikasi aset. Melalui temuan ini, Pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangannya melalui strategi pengendalian dan tindak lanjut yang lebih efektif.

**Kata Kunci :** Pemeriksaan LKPD, Temuan Berulang, Tindak Lanjut Rekomendasi

## ABSTRACT

*The repeated audit findings in the financial reports of Kupang Regency Government, particularly in fixed asset management, reflect challenges in implementing audit recommendations and highlight inefficiencies in the internal control system. Despite corrective efforts, certain obstacles continue to cause similar issues annually. This study aims to identify and analyze the factors influencing the resolution of audit follow-up recommendations related to asset management in Kupang Regency. Using a qualitative method and case study approach, data were collected through in-depth interviews with officials from the Regional Secretariat, Inspectorate, and Finance and Asset Agency. The analysis reveals that weaknesses within the Internal Control System (ICS)—notably in the areas of control environment, monitoring, and communication—along with suboptimal roles of internal and external stakeholders, are primary contributors to repeated audit findings. Additionally, resource constraints and less effective follow-up strategies significantly impact the resolution of audit recommendations. The study implies the importance of strengthening the ICS, enhancing inter-unit coordination, and optimizing collaboration with external entities such as the National Land Agency (BPN) to expedite asset certification. These findings are expected to aid Kupang Regency Government in improving accountability, transparency, and financial report quality through more effective control and follow-up strategies.*

**Key Word :** *Audit of Local Government Financial Statements (LKPD), Repeated Audit Findings, Follow-up on Recommendations*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala atas segala berkat dan kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Akt., CPI, CA, CPA., selaku Ketua Program Studi PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. AUGUSTPAOSA NARIMAN S.E., M.Ak., Ak.,CA.,CPA., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Program Studi PPA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, November 2024



Rachmat Bagus Setiawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	4
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	4
<b>2.2. Penelitian sebelumnya</b> .....	5
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	8
<b>3.1. Pendekatan Metode Penelitian</b> .....	8
<b>3.2. Objek Penelitian</b> .....	8
<b>3.3. Metode Pengumpulan Data</b> .....	8
<b>3.4. Analisis Data</b> .....	9
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	10
<b>4.1. Aspek Sistem Pengendalian Intern</b> .....	10
<b>4.2. Aspek Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut</b> .....	14
<b>4.3. Aspek Optimalisasi Peran Pihak Internal dan Eksternal</b> .....	18
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	21
<b>REFERENSI</b> .....	24

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kewajiban tahunan yang rutin dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah adalah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. LKPD disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah dan menjamin proses pengendalian internal yang baik untuk mencegah kesalahan dalam laporan keuangan. LKPD ini akan diperiksa oleh suatu Badan Negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan audit (pemeriksaan) setiap tahunnya. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki kewajiban dalam hal tersebut untuk memeriksa tingkat relevansi dan kewajaran laporan keuangan serta memperhatikan temuan-temuan yang signifikan. BPK juga memiliki kewajiban dalam memberikan opini terkait LKPD yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan BPK atas laporan keuangan akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini dan juga rekomendasi perbaikan atas permasalahan atau temuan pemeriksaan. LHP ini yang terdiri atas 2 bagian (2 buku), dimana buku pertama berisi tentang LHP laporan keuangan dan buku kedua mengenai LHP Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun Opini yang diberikan BPK terhadap LKPD yang diperiksa terdiri diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW). Berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2022 atas 524 LKPD seluruh Indonesia, diketahui bahwa terdapat sejumlah 496 (91%) LKPD yang mendapatkan opini WTP, 41 (8%) LKPD mendapatkan opini WDP, dan 5 (1%) LKPD yang mendapatkan opini TW. Capaian tahun 2022 ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 500 dari 542 LKPD mendapatkan opini WTP. Meskipun terdapat penurunan LKPD yang mendapatkan opini WTP, terdapat sejumlah 15 LKPD mendapatkan kenaikan opini dari WDP menjadi WTP (Badan Pemeriksa Keuangan, 2023). Kenaikan tersebut merupakan hasil dari proses tindak lanjut dari Pemerintah Daerah yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa (BPK).

Perbaikan atas permasalahan temuan berulang ini merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang berupa tindakan perbaikan oleh pemerintah daerah. tindakan tersebut berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan opini pemeriksaan. Pencapaian peningkatan opini atas LKPD tersebut diantaranya diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2022 meraih opini WDP untuk pertama kalinya. Rekomendasi perbaikan masih disertakan meskipun Pemerintah Kabupaten Kupang telah menerima opini WDP.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh Opini WTP setelah pada tahun 2021 memperoleh Opini WDP, dengan dasar pengecualiannya terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dengan nilai yang material. Pada tahun 2022 telah dilakukan perbaikan atas penatausahaan aset tetap oleh Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, serta terjadi peningkatan opini atas laporan keuangannya. Namun demikian, hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2022 dan tahun 2023 masih ditemukan permasalahan atau temuan berulang terkait dengan penatausahaan aset tetap, meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi opini laporan keuangannya. Selanjutnya pada LHP Buku II tahun 2022 juga diungkapkan bahwa tindak lanjut atas permasalahan penatausahaan aset tetap yang belum tertib tersebut masih dalam proses atau belum sepenuhnya selesai sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya temuan berulang pada LHP Buku II LKPD Kabupaten Kupang pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yang didalamnya terdapat hasil pemeriksaan tentang aset tetap. Dimana pada kurun waktu 3 tahun tersebut, ditemukan adanya temuan berulang terkait dengan penatausahaan aset tetap. Temuan berulang ini disebabkan karena entitas terperiksa belum melakukan tindakan perbaikan atas rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa sebelumnya, sehingga pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada periode berikutnya akan mengulangi rekomendasi yang sama atas permasalahan berulang tersebut pada pemeriksaan berikutnya hal ini diungkapkan oleh Brook & Pariser (1995) dan Holland (1999). Selain itu, proses tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya yang berhubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, menjadi bahan pertimbangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan LKPD, yang mengakibatkan adanya temuan berulang terkait dengan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.
- \_\_\_\_\_. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*.
- Brooks, R. C., & Pariser, D. B. (1995). Audit Recommendation Follow-Up System: A Survey of the States. *Public Budgeting & Finance*.
- Fitri, W. (2024). Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 2681–2689. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4369>
- Husni, M., Idayu, R., & Supriyatna, N. (2022). Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4062–4070. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019>
- Holland, W. G. (1999). *Audit Advisory 1999*. 1–4.
- Lambo, Y. V., & Ritonga, I. T. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Temuan Berulang (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Provinsi NTT). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol 11 No 2, 195-212. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i2.84920>
- Nunu, I., Sondakh, J., Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, Vol. 8 No. 1 Juni 2017. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15307>
- Peter, Von, Grebel., Shreya, Rajmane. (2023). Proposed Framework and Method for Integrating Risks into an Organizational Setting. *Journal of enterprise and business intelligence*, doi: 10.53759/5181/jebi202303013
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pongoliu, R. R., Saerang, D., Manossoh, H. (2017). Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

*Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL", Vol. 8 No. 1 Juni 2017.*

<https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15254>

Pramana, A., Meme, R., Duwi, R., Oktaviana, W. P., & Mayciella, S. (2023). Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Pemeriksaan Sebagai Penunjang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1).

<https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5936>

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Samsu. (2017). Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Jambi. Pusaka

Zhang, X. (2023). The Impact of Internal and External Coordination on Organizational Performance. *Journal of Enterprise and Business Intelligence*, 23–32.

<https://doi.org/10.53759/5181/jebi202303003>